

PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

(Studi di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Azhim Rohmanu, Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Hayat, S.A.P., M.Si

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: Azhimr47@gmail.com*

ABSTRACT

Community needs for protection against disasters both social disasters, natural disasters and non-natural disasters must be taken seriously, especially for areas that are very prone to disasters as needed as early as possible, for example Pandansari Village, Poncokusumo District, Malang Regency. The purpose of this study was to describe and analyze the empowerment of Satlinmas members in disaster management in Pandansari Village, Poncokusumo Subdistrict, Malang Regency and to know and understand the factors that inhibited Satlinmas empowerment in disaster management in Pandansari Village, Poncokusumo District, Malang Regency. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. The analysis used is the analysis of the Interactive models of Miles, Huberman and Saldana. In this analysis model the researcher conducts 4 stages, namely data collection, data condensation, data presentation, then drawing conclusions. The conclusions of this study include: 1) Development of satlinmas through extension activities in addition to aiming at delivering an empowerment program also providing material to Satlinmas members around anticipating disruption of community security through empowerment. 2) Increasing Satlinmas capacity through Skills Training activities aimed at preparing and equipping the knowledge and skills of Satlinmas members in disaster management. 3) The granting of authority is reviewed through Supervision by monitoring Satlinmas preparedness by the Village Head so that the provision of Coaching and Counseling as well as Skills Training carried out previously can be beneficial as it should. Furthermore, the internal inhibiting factor is the lack of facilities and infrastructure so that empowerment does not run smoothly and lack of knowledge and skills of members of the Satlinmas about disaster, while the external is the awareness of the people who are still lacking, and the geographical conditions that are prone to disasters. So the suggestion from the author is that Satlinmas in Pandansari village must also propose additional funding requests to complement facilities and infrastructure that may still be lacking and approach the government about the importance of empowerment for members of Satlinmas as a form of self-awareness in handling disasters or disruption of community security in their environment, but still there must be supervision of funds for every detail of these requirements

Keywords: Empowerment, Community Service, Community Protection.

Pendahuluan

Keamanan dan ketertiban dapat terwujud apabila tidak ada lagi bencana sosial, bencana alam, maupun bencana non-alam. Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. (Asian Disaster Reduction Center, 2003). Selanjutnya, Definsi bencana pada Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan definisi bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Namun masyarakat pada umumnya kurang terlatih, kurang mandiri dan

kurang memiliki pengetahuan akan hal-hal tersebut, sehingga gangguan

keamanan ketertiban selalu terjadi, susah diatasi dan tidak bisa dicegah. Padahal sebaiknya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kerawanan dan dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat harus diatasi dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di masyarakat secara terpadu. Oleh karena itu peran aparat dalam pemberdayaan potensi masyarakat merupakan syarat utama dan mutlak agar masyarakat dapat diikuti sertakan secara aktif dalam menciptakan dan memelihara kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat sehingga dapat mendukung jalan nya pembangunan. Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sangat diperlukan dalam siaga bencana misalnya bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta membantu aparat lain seperti polisi dala menertibkan masyarakat. Memperhatikan hal tersebut, maka Satlinmas yang keberadaannya

ditengah-tengah masyarakat serta memiliki tugas membantu penanggulangan bencana, maka dapat lebih diberdayakan dan dikembangkan kapasitasnya sehingga diharapkan mampu menjadi barisan terdepan atau ujung tombak yang dapat memberikan pertolongan pertama pada saat terjadi bencana maupun gangguan ketertiban atau keamanan. Oleh karena itu dalam penulisan ini, penulis ingin melihat lebih mendalam mengenai cara pemberdayaan anggota satlinmas itu sendiri, dimana masyarakat yang baru bergabung kedalamnya tentu kurang pelatihan serta kurang memiliki pengetahuan akan dilatih instansi-instansi terkait. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui program-program yang dibuat Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya sebagai organisasi pemerintah yang diberi tugas terjun ke masyarakat dan juga mendampingi masyarakat agar lebih aman, tertib, terhindar dan waspada terhadap bencana. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Untuk memahami pemberdayaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dan untuk memahami faktor-faktor apa saja yang menghambat pemberdayaan Satlinmas di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar “pemberdayaan” dimana “daya” bermakna kekuatan (*power*). Secara etimologi pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Menurut Ambar Teguh (2004: 77), bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Sedangkan Suparjan & Hempri (2003: 43), mengatakan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu *to give or authority to* dan *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian yang kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

2. Pemberdayaan Aparatur

Pemberdayaan aparatur tidak dapat terlepas dari kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang di titik beratkan untuk menciptakan aparatur pemerintah yang berkualitas. Upaya pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya aparatur merupakan salah

satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian demi tercapainya tujuan oeganisasi. Pemberdayaan aparatur merupakan cara untuk mendapatkan aparatur yang berkualitas dan dapat menciptakan kemandirian dan kepercayaan akan kemampuan yang dimiliki. Sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai aspek utama yang mengatur dan menjalankan sistem atau manajemen dalam organisasi menjadi tumpuan utama organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Sumber daya aparatur mempunyai peran strategis terhadap tujuan organisasi, bahkan menjadi sentral terhadap keberadaan organisasi. Begitu juga sumber daya-sumber daya lain, dikelola dan dikembangkan melalui sumber daya manusia organisasi. (Hayat, 2017:105)

3. Satuan Perlindungan Masyarakat

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Pada Pasal 1 butir 3 dan 4 yaitu : “Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.”

4. Pengertian Bencana

Bencana didefinisikan sebagai suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga meyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi,ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri. (UNISDR *Terminology on Disaster Risk Reduction* 2009). Bencana merupakan hasil dari kombinasi pengaruh bahaya, kondisi kerentanan pada saat ini, kurangnya kapasitas maupun langkah-langkah untuk mengurangi atau mengatasi potensi dampak negatif. Selanjutnya, Definisi Bencana pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan definisi bencana adalah Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik

oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Peneliti berupaya untuk mengkaji dan menganalisis secara menyeluruh mengenai pemberdayaan anggota Satlinmas dalam penganggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, dan faktor-faktor yang menghambat pengembangan kapasitas anggota Satlinmas dalam penanggulangan bencana (faktor internal dan eksternal). Melalui desain penelitian yang digunakan, maka peneliti melakukan pengumpulan data secara *holistic* kepada Kepala Desa Pandansari/Koordinator Satuan Linmas, Kepala Satuan Tugas/Koordinator Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan, Masyarakat serta Satlinmas di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo.

Fokus yang menjadi penelitian ini didasarkan atas Sasaran Kinerja Pelayanan Dasar SKPD Perlindungan Masyarakat melalui teori tahap-tahap pemberdayaan oleh Wrihatnolo (2007:2) yaitu antara lain: 1. Pemberdayaan satlinmas dalam penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut: (a) Penayadaran Satlinmas dalam penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. (b) Pengkapasitasan Satlinmas dalam penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. (c) Pemberian Kewenangan dalam penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. 2. Faktor-faktor penghambat apa saja dalam pemberdayaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, dengan sub fokus : (a) Faktor Internal yang akan dihadapi linmas dalam penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. (b) Faktor Eksternal yang akan dihadapi linmas dalam penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Malang tepatnya di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo dan Kantor Satlinmas Kabupaten Malang. Hal ini atas pertimbangan bahwa: 1. Wilayah Kabupaten Malang yang memiliki mobilitas sangat tinggi serta memiliki dinamika sosial, ekonomi, politik, dan keamanan yang juga tinggi. 2. wilayah Kabupaten Malang hampir seluruh wilayahnya rawan berbagai bencana, seperti: banjir, tanah longsor, angin kencang, gempa bumi dll. Seperti yang dikutip pada (<http://mediamalang.com>). Bahwa intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Malang Raya disertai tingkat kemiringan wilayahnya, berpotensi terjadi bencana tanah longsor dan banjir. Wilayah Malang Raya yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu masuk dalam daerah rawan terjadi bencana. Sedangkan Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu wilayah rawan bencana seperti yang dijelaskan tadi. Teknik pengumpulan data yaitu: (1) Wawancara, Menurut Sugiyono (2018:138) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. (2) Observasi, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sutrisno Hadi, 1998 dalam Sugiyono 2018:145). (3) Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2008:240) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dan menjelaskan bahwa hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumen. Data-data yang dapat dijadikan informasi dalam penelitian ini yaitu data-data yang ada kaitannya dengan Satlinmas di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Menurut Moleong (2011:324) untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.

Ada 4 teknik penelitian yang dapat dipergunakan dalam menempatkan keabsahan data yaitu : 1. Kepercayaan (*credibility*) 2. Keteralihan (*transferability*) 3. Ketergantungan (*dependability*) 4. Kepastian (*confirmability*). Analisis Data yang digunakan adalah analisis dekskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka analisis yang digunakan adalah menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan keadaan serta kejadian yang sebenarnya dan kemudian hasilnya diinterpretasikan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

(Sugiyono, 2012) Sesuai dengan jenis penelitian diatas, maka penulis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dengan tiga analisis. Analisis data tersebut dengan tiga langkah yaitu Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian

A. Pemberdayaan Satlinmas dalam Penanggulangan Bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Berdasarkan atas Sasaran Kinerja Pelayanan Dasar SKPD Satuan Perlindungan Masyarakat, maka Pemberdayaan Satlinmas dalam Penanggulangan Bencana guna mempersiapkan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dilakukan dengan melalui 3 (Tiga) tahapan yaitu Penyadaran Satlinmas, Pengkapisitasan Satlinmas dan Pemberian Kewenangan, sebagai berikut: A) Penyadaran Satlinmas. Bentuk Penyadaran Satlinmas Penyadaran merupakan menyampaikan bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki “sesuatu”. Begitu juga penyadaran satlinmas adalah proses dimana Kepala Desa menyadarkan seluruh anggota Satlinmas bahwa mereka memiliki fungsi lebih baik tidak hanya sebagai petugas kantramtibmas. Berikut adalah pembahasan dari bentuk penyadaran Satlinmas Desa Pandansari. Pembinaan merupakan langkah awal oleh Linmas Desa Pandansari kepada Anggotanya untuk menjelaskan tujuan pemberdayaan dan program-program apa saja yang akan dilaksanakan dalam pemberdayaan Satlinmas serta berdialog dengan narasumber dari berbagai instansi agar informasi atau pengetahuan yang didapatkan maksimal. B) Pengkapisitasan Satlinmas. Bentuk pengkapisitasan Satlinmas ini dilakukan dengan kegiatan Pelatihan Keterampilan kepada Satlinmas. Maksud dan tujuan penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Satlinmas di desa pandansari adalah untuk membantu aparat desa dalam menanggulangi setiap potensi bencana, serta memberi pemahaman setiap anggota satlinmas untuk mampu mengatasi setiap masalah yang terjadi saat terjadi bencana. Selain tujuan diatas adanya Linmas atau badan lain yang bertugas penanggulangan bencana bisa mengcover masyarakat saat terjadi bencana. Selanjutnya juga menjelaskan bahwa pada dasarnya satlinmas yang dibentuk untuk menanggulangi bencana juga berfungsi sebagai pembantu pemerintah khususnya BPBD pada saat

bencana terjadi. C) Pemberian Kewenangan Satlinmas. Bentuk Pemberian Kewenangan pada Satlinmas ini ditinjau melalui Pengawasan dalam bentuk pemantauan kesiapsiagaan Satlinmas oleh Kepala Desa sehingga pemberian Pembinaan berupa Penyuluhan serta Pelatihan Keterampilan yang dilakukan sebelumnya dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Pengawasan menjadi salah satu program yang dibuat Kepala Desa Pandansari untuk melakukan pemantauan atas upaya pemberdayaan Satlinmas di desa pandansari. Kegiatan ini dilakukan agar Satlinmas tetap hidup dan berjalan sesuai tugas dan fungsinya serta jumlah personil satlinmas tetap bisa dikontrol.

B. Faktor-faktor yang menghambat Pemberdayaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Faktor Internal. 1. Kurang Tersedianya Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasana yang ada di Desa Pandansari masih kurang memadai, sehingga dalam mengatasi pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana belum berjalan secara maksimal. Kurangnya peralatan tersebut tidak dapat menjangkau seluruh dusun disetiap desa. Selain itu juga dibutuhkan pembaharuan peralatan atau penggantian peralatan yang sudah rusak. 2. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan Anggota Satlinmas tentang Kebencanaan. Pemahaman anggota Satlinmas maupun masyarakat tentang bencana masih sangat minim. Pengetahuan kebencanaan baru dikenal oleh kalangan tertentu dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya ketertarikan mereka untuk lebih mengenal kebencanaan dengan konsep yang lebih baik Pengetahuan Satlinmas terhadap potensi ancaman/bahaya bencana akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap bencana tersebut. Perasaan aman tinggal di daerah yang sebenarnya rawan terhadap ancaman bencana mengandung resiko yang sangat besar. Karena dengan perasaan aman masyarakat akan kehilangan kewaspadaan terhadap kemungkinan timbulnya bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi di wilayah tersebut. Faktor Eksternal. 1. Kesadaran Masyarakat yang Masih Kurang. Faktor masyarakat menjadi penting mengingat masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan. Masyarakat masih menganggap satlinmas hanya untuk keamanan dan ketertiban walaupun sebenarnya perannya lebih luas. Selain itu masyarakat masih memandang bahwa menjadi satlinmas tidak terlalu penting dan tidak ada *income*. Hal

tersebut menjadi kendala sebab apabila masyarakat masih memandang remeh peran Satlinmas, maka hal tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi mereka, dari situlah alasan mengapa kebanyakan Satlinmas berasal dari pekerja non formal, sebab kesadaran, kepedulian, dan partisipasi serta sifat yang sukarela lebih banyak datang warga yang berprofesi sebagai pekerja non formal, hanya berstatus anggota Satlinmas yang memiliki tanggung jawab yang besar. Padahal pada sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah sukarela dan tidak diberi imbalan atau *reward* apapun. 2. Kondisi Geografis yang rawan akan terjadi Bencana. Desa Pandansari memiliki beragam potensi bencana alam yang lengkap. Pasaunya, kondisi geografisnya merupakan perpaduan antara pegunungan dan lautan. Selain itu, Desa Pandansari yang termasuk dari bagian Kabupaten Malang juga berada di pertemuan sesar Eurasia dan Indo-Australia. Belum lagi jalur gunung berapi. Semua jenis bencana alam, mulai gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor hingga banjir bisa saja terjadi di desa pandansari Berbagai bencana alam geologi seperti erupsi gunung berapi, banjir, tsunami, angin puting beliung, gempa bumi dan tanah bergerak atau longsor, tidak bisa dihindari oleh masyarakat Desa Pandansari. Dari penyajian diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat pemberdayaan Satlinmas di desa pandansari terdiri dari faktor internal yaitu Kurang Tersedianya Sarana dan Prasarana, Kurangnya Pengetahuan Anggota Satlinmas tentang Kebencanaan dan koordinasi yang belum maskimal, sedangkan faktor eksternalnya yang menghambat pemberdayaan Satlinmas Kabupaten malang yaitu Kesadaran Masyarakat yang Masih Kurang, selain itu faktor lain adalah Kondisi Geografis yang rawan akan terjadi Bencana dimana kondisi geografisnya merupakan perpaduan antara pegunungan dan lautan.

Pembahasan Pemberdayaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

1. Penyadaran Satlinmas.

Menurut Bastaman (2007:132) salah satu aspek upaya dalam pemberdayaan adalah kegiatan terarah (*Diracted Activities*) dimana merupakan upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja dan sadar berupa pengembangan potensi-potensi (bakat, kemampuan dan keterampilan) positif serta pemanfaatan relasi antar pribadi untuk menunjang tercapainya makna dan tujuan dari pemberdayaan

itu. Hal ini sesuai dengan pemberdayaan satlinmas bahwa satlinmas memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai mobilisasi yang sewaktu-waktu siap dikerahkan dalam membantu penyelenggaraan pemerintah.
2. Sebagai ujung tombak/garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana.
3. Sebagai pintu awal informasi bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah serta masyarakat yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana.

Penyadaran fungsi-fungsi Satlinmas diatas dilakukan dengan pembinaan yang merupakan salah satu tahap dari tiga tahap pemberdayaan satlinmas di desa pandansari. Pembinaan dalam pemberdayaan satlinmas di desa pandansari berupa Penyuluhan. Penyuluhan adalah kegiatan yang berupa tukar informasi yang berkaitan dengan peningkatan peran Satlinmas. Pembinaan dan Penyuluhan dalam pemberdayaan Satlinmas desa pandansari juga memenuhi tiga pendekatan utama menurut Kartasmitra (2005) Pendekatan utama tersebut dikaji dengan sosialisasi pemberdayaan sebagai berikut : 1. Upaya pemberdayaan harus terarah (*targetted*), ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan progam yang dirancang untuk mengatasi masalah dan sesuai kebutuhan. Sosialisasi dalam pemberdayaan sudah terarah (*targetted*). Diturunkan langsung kepada masyarakat yang sudah menjadi anggota Satlinmas dan masyarakat yang menjadi calon-calon anggota satlinmas. 2. Program harus langsung mengikut sertakan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Hal ini bertujuan agar bantuan tersebut efektif, karena sesuai dengan pemberdayaan satlinmas Satlinmas mengikut sertakan langsung masyarakat yaitu anggota dan calon anggota satlinmas. 3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi nya dan juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Dalam pembinaan berupa penyuluhan ini membentuk program-program apa saja yang akan dijalankan dalam pemberdayaan satlinmas. Pembentukan ini ditujukan untuk mempermudah kerjasama dalam penyelesaian masalah di masyarakat dan mempermudah Kepala Desa untuk melakukan Pengawasan.

2. Pengkapasitasan Satlinmas

Tahap selanjutnya adalah pengkapasitasan inilah yang sering kita sebut "*capacity building*" atau dalam bahasa yang lebih sederhana memungkinkan untuk diberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu

terlebih dulu. Misalnya, Satlinmas sebelum terjun langsung di masyarakat dan mengerti bagaimana mengatasi setiap masalah keamanan, ketertiban dan juga penanganan dalam penanggulangan bencana mereka diberi kemampuan untuk membuat mereka paham dan mengerti bagaimana cara menanggulangi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya Wrihatnolo (2007:2) berpendapat bahwa tahap pemberdayaan dilakukan melalui pengkapisitasan yaitu pemberian kapasitas atau peningkatan kemampuan manusia dalam arti meningkatkan kemampuan manusia baik individu maupun kelompok. Sesuai dengan teori tersebut pemberdayaan satlinmas dilakukan melalui tahap pengkapisitasan satlinmas dengan bentuk kegiatan Pelatihan Keterampilan. Kegiatan ini adalah bentuk dari proses Pemberdayaan Satlinmas di Desa Pandansari. Pemberdayaan satlinmas dilakukan untuk menyiapkan dan membekali pengetahuan serta ketrampilan anggota satlinmas dengan tujuan agar mampu melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko akibat bencana, serta ikut memelihara kantramtibmas dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

3. Pemberian Kewenangan.

Tahap selanjutnya adalah pemberian kewenangan, pada tahap ini target sasaran diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Wrihatnolo (2007:2) berpendapat bahwa pemberian daya merupakan pemberian kekuasaan, otoritas atau peluang kepada target sasaran. Pemberdayaan Satlinmas merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan tugas Satlinmas. Tugas Satlinmas dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Linmas diharapkan dapat menjadi pionir atau garda terdepan dalam penanganan bencana
2. Peran serta Linmas diharapkan pada saat pra bencana dengan memberikan pelatihan dan pemahaman tentang kebencanaan serta menjadi unsur penggerak masyarakat dalam rangka menciptakan "Desa Tanggap Bencana"
3. Peran Linmas pada saat terjadinya bencana menjadi unsur yang terpenting sebagai perwakilan pemerintah ditingkat Desa/Kelurahan dalam membantu proses evakuasi dan penanganan sampai ada tindakan atau bantuan dari pihak yang terkait.

Tahap pemberian kewenangan tidak lepas dari kegiatan pengawasan agar kewenangan tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengawasan adalah salah satu program yang dibuat oleh Kepala Desa untuk meninjau pemberdayaan Satlinmas di Desa Pandansari. Kegiatan Pengawasan berupa pemantauan agar Satlinmas tetap hidup dan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta jumlah anggota Satlinmas tetap bisa dikontrol.

Faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan satlinmas dalam rangka penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Pemberdayaan Satlinmas di Desa Pandansari tidak berjalan dengan lancar begitu saja. Pemberdayaan Satlinmas dipengaruhi oleh faktor penghambatnya. Terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat jalannya pemberdayaan Satlinmas. Berikut adalah pembahasan dari faktor penghambat pemberdayaan Satlinmas Kabupaten Malang: 1. Faktor Internal adalah faktor dari dalam instansi pelaksanaan pemberdayaan yaitu Satlinmas Desa Pandansari. Berikut adalah pembahasan Faktor penghambat internal dalam pemberdayaan Satlinmas di Desa Pandansari : A. Kurang Tersedianya Sarana dan Prasarana. Sarana dan Prasarana yang terbatas dan tidak dapat mencukupi kebutuhan Satlinmas menjadikan salah satu faktor penghambat. Dalam lima prinsip dasar konsep pemberdayaan menurut Sumaryadi (2005) terdapat satu prinsip yaitu prinsip nomor empat menjelaskan bahwa dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal sarana dan prasarana baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun sumber-sumber lainnya. Melihat hal tersebut, kita dapat melihat bahwa faktor sarana dan prasarana merupakan faktor terpenting dalam suatu pemberdayaan. Begitu pula dalam pemberdayaan Satlinmas. B. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan Anggota Satlinmas tentang Kebencanaan. Pengetahuan merupakan kemampuan serta kesanggupan satlinmas untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Dimana Pengetahuan merupakan bentuk kesanggupan dan kemampuan satlinmas yang dituangkan dalam perilaku dan sifat dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian pengetahuan adalah suatu sifat, karakter, dan ciri seseorang yang diperlihatkan melalui kesanggupannya dalam melaksanakan suatu tugas maupun kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan desa dan pembangunan, Satlinmas dituntut untuk mampu mewujudkan suatu hasil kerja yang optimal dan mampu membawa dampak positif bagi kemajuan organisasinya. Selain itu SDM yang terampil adalah aspek terpenting dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bencana. Dimana pemberian pelatihan keterampilan satlinmas adalah sebagai bentuk upaya dalam pelaksanaan Pemberdayaan Satlinmas di desa pandansari, untuk mengurangi dan membekali para anggota satlinmas yang ada untuk dapat memahami dan mengambil tindakan di saat akan terjadi bencana, ataupun saat bencana terjadi dan sesudah terjadi bencana. Selanjutnya adalah Faktor Eksternal yang merupakan faktor dari luar instansi pelaksana pemberdayaan satlinmas di desa pandansari Berikut

adalah pembahasan Faktor penghambat eksternal dalam pemberdayaan satlinmas kabupaten Malang: A. Kesadaran Masyarakat yang Masih Kurang. Dalam pelaksanaan pemberdayaan anggota Satlinmas, pandangan masyarakat menjadi faktor penghambat. Khususnya di Desa Pandansari, hal ini dikarenakan Masyarakat masih menganggap satlinmas hanya untuk keamanan dan ketertiban. Selain itu masyarakat masih memandang menjadi satlinmas tidak terlalu penting. (Padahal faktor masyarakat menjadi penting mengingat tolak ukur keberhasilan suatu pemberdayaan. (Paripurno, 2014:41)). 2. Kondisi Geografis yang rawan akan terjadi Bencana. Hambatan umum pada pemberdayaan Satlinmas salah satunya adalah letak goeografis desa pandansari yang termasuk bagian dari Kabupaten Malang yang memiliki daerah tergolong rawan bencana. Menurut Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB 2006-II-I) Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh manusia (*man-made disaster*). Faktor-faktor yang menyebabkan bencana antara lain :

- a. Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*manmade hazards*) yang menurut *United Nation International Strategy For Disaster Reduction* (UN-ISDR) dapat di kelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*) bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorolgcil hazards*), dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*)
- b. Kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang berisiko bencana.
- c. Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Kesimpulan

Dalam pencapaian progam Pemberdayaan Satuan perlindungan Masyarakat di Desa Pandansari bisa dikatakan telah berjalan dengan lancar, meskipun ada kendala atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberdayaan Satlinmas. Progam tersebut dilakukan melalui tahap antara lain : Penyadaran Satlinmas, Pengkapasitasan Satlinmas dan Pemberian Kewenangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat kegiatan pemberdayaan Satlinmas ini, antara lain :

- a. Faktor internal yaitu faktor dari dalam instansi pelaksana pemberdayaan yaitu Satlinmas Desa Pandansari antara lain : Kurang Tersedianya Sarana dan Prasarana, kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan anggota Satlinmas tentang Kebencanaan, Pemahaman anggota Satlinmas maupun masyarakat tentang bencana masih sangat minim.
- b. Sedangkan faktor eksternalnya adalah Kesadaran Masyarakat yang Masih Kurang.

Masyarakat masih menganggap satlinmas hanya untuk keamanan dan ketertiban walaupun sebenarnya perannya lebih luas. kemudian faktor lain adalah Kondisi Geografis yang rawan akan terjadi Bencana. Desa Pandansari memiliki beragam potensi bencana alam yang lengkap. Pasalnya, kondisi geografisnya merupakan perpaduan antara pegunungan dan lautan.

Saran

Setelah melihat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, berikut adalah saran yang dibuat penulis sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam rangka mensukseskan pemberdayaan satlinmas dalam penanggulangan bencana :

1. Satlinmas di desa pandansari juga harus mengusulkan permintaan tambahan dana guna melengkapi sarana dan prasarana yang mungkin masih kurang dan melakukan pendekatan kepada pemerintah tentang pentingnya pemberdayaan untuk anggota satlinmas sebagai wujud kewaspadaan diri pada penanganan bencana atau gangguan kamtramtibmas di lingkungannya, namun tetap harus ada pengawasan dana setiap rincian keperluan tersebut.
2. Koordinasi antar instansi yang terlibat perlu dibangun ataupun ditingkatkan kembali oleh Satlinmas desa pandansari, karena dengan dukungan dari pihak yang terkait akan mampu memberikan efek positif terhadap pembangunan dalam pemberdayaan satlinmas.
3. Satlinmas harus terus menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga penyedia data yang relevan dalam penanganan bencana seperti BPBD dan lembaga sejenis lainnya ditingkat regional, karena ketersediaan dan keakuratan data sangat penting untuk menjamin tercapainya manfaat penggunaan sistem informasi dalam manajemen penanggulangan bencana.

Daftar Pustaka

- Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta : Gava Media, 2004..
- Asian Disaster Reduction Center. (2003). *Glossary on Natural Disasters* From www.adrc.or.jp (Diakses tanggal 24 November 2018 Pukul 15:00)
- Bakornas PB, *Rencana Pedoman penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di daerah*. (<http://www.bakornaspb.go.id>)
- Bastaman, H.D. (2007). *Logoterapi :Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup Bermakna*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Hayat. 2017, *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

- Kartasasmita , Ginanjar , dkk. 2005. *Pembaharuan dan Pemberdayaan*. Ikatan Alumni ITB.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Paripurno, Eko, Teguh. (2011). *Panduan pengelolaan resiko bencana berbasis Komunitas*, Jakarta:Masyarakat penanggulangan bencana Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparjan & Hempri Suyatno. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana
- UNISDR. 2002. *United Nations International Strategy For Disaster reduce*. Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters.
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. (2007) *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Media Komputindo.